

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT REKLAMASI
PANTAI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR TERHADAP KONFLIK LAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK**

*Suatu Arah Kebijakan Pemerintah Kota Parepare dalam
Pemanfaatan Lahan dan Bangunan di Pantai Cempae
Pasca Reklamasi*



disusun dan diajukan oleh

ANDI MUJAHIDIN

P052192004

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA MANAGEMEN PERKOTAAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Mujahidin
Nim : P052192004
Program Studi : Magister Manajemen Perkotaan

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terkait Reklamasi Pantai Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Konflik Lahan Sertifikat Hak Milik Warga adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang –Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Andi Mujahidin
P052192004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT REKLAMASI PANTAI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP KONFLIK LAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK WARGA, ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Managemen Perkotaan Universitas Hasanuddin, Makassar. Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis yang telah mengasuh dan membimbing penulis dan tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Arifuddin Akil, M.T., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Perkotaan Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Ananto Yudono, M.Eng. (Alm), selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Arifuddin Akil., MT, selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Dr. Ir. Andi Bachtiar Arief., MTP, Bapak Ir. Mukti Ali, ST., MT., Ph.D., IPU., dan Ibu Dr. Ir. Mimi Arifin., M.Si., selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan tesis penulis ini lebih baik
7. Seluruh Dosen Program Studi Pascasarjana Managemen Perkotaan Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagi ilmunya kepada

penulis selama menjalani proses perkuliahan di Program Studi Pascasarjana Manajemen.

8. Seluruh staff Pascasarjana Manajemen Perkotaan Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh keluarga besar Drs.Andi Muh Aqil Patimpa. Dr,Andi Akram Aqil.,SH.,MH,Andi Amirullah Aqil.,BAE, Andi Mulyadi Aqil,SE,MH. Andi Muzakkir Aqil.,SH.,MH.Andi Nurhidayah,SH. yang telah banyak membantu memberi dukungan baik secara moril dan materil selama kuliah hingga penyelesaian tesis ini.
- 10.Juarni Jubir.,S.Kep,Andi Muhammad Kartabuana Mujahidin dan Andi Aqila Lutfiah Mujahidin, selaku istriku dan anak-anakku tercinta, yang selalu memberi semangat dan dukungan serta doa dalam menjalankan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Parepare. 19 Desember 2023

Andi Mujahidin
P052192004

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**"PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT REKLAMASI PANTAI DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT PSISIR TERHADAP KONFLIK
LAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK WARGA"**

**Suatu Arah Kebijakan Pemerintah Kota Parepare Dalam Pemanfaatan Lahan
Dan Bangunan Di Pantai Cempae Pasca Reklamasi**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUJAHIDIN
P052192004**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Manajemen Perkotaan
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 27 Desember 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ir. Ananto Yudono, M.Eng
NIP. 19481221 19602 1 001

Prof. Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT
NIP. 19630504 199512 1 001

Ketua Program Studi
Magister Manajemen Perkotaan



Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT
NIP. 19630504 199512 1 001

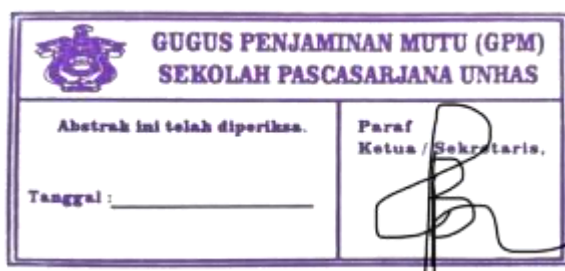
Dr. Budi, Ph.D., Sp.M(K), M.Med.Ed
NIP. 19661231 199503 1 009

ABSTRAK

Andi Mujahidin. *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terkait Reklamasi Pantai Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Konflik Lahan Sertifikat Hak Milik. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi status legalitas lahan hasil reklamasi pantai Cempae, mengidentifikasi dampak reklamasi pantai terhadap kondisi perekonomian masyarakat pesisir, dan mengidentifikasi arahan manajemen/pengelolaan lahan hasil reklamasi Pantai Cempae di Kota Parepare (dibimbing oleh **Ananto dan Arifuddin Akil**)*

Menentukan status legalitas lahan dilakukan dengan teknik analisis kualitatif. Untuk menentukan dampak reklamasi pantai terhadap kondisi perekonomian masyarakat dilakukan dengan teknik analisis kuantitatif menggunakan analisis Regresi Linear. Untuk menentukan arahan pengelolaan lahan hasil reklamasi, dilakukan analisis kualitatif. Dengan demikian maka dalam penelitian ini menggunakan metode *mixed methods*, Hasil penelitian adalah reklamasi pantai sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun status lahan pantai Cempae hingga saat ini menjadi permasalahan dimana ditemukan sebanyak 117 masyarakat mengaku memiliki kepemilikan lahan dengan status sertifikat, di lain pihak Pemkot Parepare dalam hal ini Bidang aset menganggap bahwa kepemilikan lahan yang diakui Masyarakat tersebut adalah illegal. Adapun arahan Manajemen oleh pemerintah daerah antara lain: 1. melakukan kepastian status lahan seperti papan bicara dan melalui jalur hukum; 2. Tetap mengembangkan dinamika kegiatan ekonomi yang sudah ada dengan memberikan akses kepada masyarakat pelaku ekonomi; 3. Setiap lahan yang telah dilegalisasi, segera dipetakan pemanfaatan ruangnya; 4. Mengatur retribusi kepada setiap pelaku usaha ekonomi; 5. Mengembangkan pariwisata; 6. Memperbaiki pengelolaan lahan yang kelola oleh perusda, organisasi pemerintah, pariwisata, serta meningkatkan sarana dan prasarannya. Dengan adanya Lahan Hasil Reklamasi Pantai Cempae akan menunjang peningkatan perekonomian, peningkatan perekonomian, peningkatan sosial budaya dalam Sektor Bisnis dan Hiburan, dan Sektor Pariwisata Kota Parepare.

Kata Kunci: *Kebijakan, Reklamasi, Pembangunan Ekonomi, Konflik Sertifikat*





ABSTRACT

Andi Mujahidin. *The Influence of Government Policy Regarding Beach Reclamation and Economic Development of Coastal Communities on Land Conflicts with Certificates of Ownership. The aim of the research is to identify the legal status of land reclamation from Cempae Beach, identify the impact of beach reclamation on the economic conditions of coastal communities, and identify management/management directions for land reclamation from Cempae Beach in Parepare City V (Guided by Ananto en Arifuddin Akil)*

Determining the legal status of land is carried out using qualitative analysis techniques. To determine the impact of coastal reclamation on the economic conditions of the community, quantitative analysis techniques using Linear Regression analysis were carried out. To determine directions for managing reclaimed land, a qualitative analysis was carried out. Thus, in this research, mixed methods were used, The results of the research are beach reclamation in accordance with statutory provisions. The status of Cempae beach land is currently a problem where it was found that 117 people claimed to have land ownership with certificate status, on the other hand, the Parepare city government, in this case the assets sector, considers that land ownership recognized by the community is illegal. The management directions by the local government include: 1. ensuring land status as a talking board and through legal channels; 2. Continue to develop the dynamics of existing economic activities by providing access to economic actors; 3. Every land that has been legalized, its spatial use must be mapped immediately; 4. Regulate levies on every economic business actor; 5. Develop tourism; 6. Improving land management managed by Perusda, government organizations, tourism, as well as improving facilities and infrastructure. With the land reclamation results from Cempae Beach, it will support economic improvement, economic improvement, social and cultural improvement in the Business and Entertainment Sector, and the Parepare City Tourism Sector.

Keywords: *Policy, Reclamation, Economic Development, Certificate Conflict*

 GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
Abstrak ini telah diperiksa. Tanggal : _____	Paraf Ketua / Sekretaris. 

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	9
1.4 Lingkup Penelitian.....	9
BAB II. METODE PENELITIAN	10
2.1 Tempat dan Waktu	10
2.2 Bahan dan Alat.....	10
2.3 Pelaksanaan Penelitian	12
2.4 Parameter Pengamatan	12
2.5 Teknik Analisis	13
2.6 Teknik Pengambilan Data	15
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	17
3.2 Hasil Temuan Penelitian.....	19
3.2.1 Gambaran Umum Kawasan Reklamasi Pantai Cempae Kota Parepare.....	19
3.2.2 Aspek Legalitas Lahan Reklamasi Pantai Cempae Di Kota Parepare	21
3.2.3 Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Reklamasi Pantai	26

3.2.4	Sebelum dan Pasca Pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai di Pantai Cempae	31
3.2.5	Kondisi Lahan Kawasan Reklamasi	34
3.2.6	Pembangunan Fungsi Ruang Pasca Pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai di Pantai Cempae	38
3.2.7	Komposisi Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.....	41
	a. Komposisi Responden Berdasarkan Usia	41
	b. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .	43
	c. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
	d. Komposisi Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja	46
	e. Komposisi Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Reklamasi.....	48
3.3.	Pembahasan	51
3.3.1	Aspek Legalitas Lahan Reklamasi Pantai Cempae Di Kota Parepare	51
3.3.2	Dampak Reklamasi Pantai Cempae Parepare Terhadap Kelangsungan Perekonomian Masyarakat Pesisir	54
3.3.3	Hasil Penelitian Dampak Reklamasi.....	55
3.3.4	Analisis Hubungan Dampak Reklamasi Pantai Cempae terhadap Peningkatan Ekonomi masyarakat	60
3.3.5	Arahan Manajemen Pengelolaan Terhadap Lahan Hasil Reklamasi Pantai Cempae Di Kota Parepare.....	69
3.3.4	Dampak yang Dihasilkan Dengan Adanya Pemanfaatan	74
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	81
4.1	Kesimpulan	81
4.2	Saran.....	83
DAFTAR	PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Parepare.	18
Tabel 2. Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Parepare.	22
Tabel 3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Reklamasi	28
Tabel 4. Komposisi Responden Berdasarkan Usia	42
Tabel 5. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 6. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel 7. Komposisi Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja	47
Tabel 8. Komposisi Responden Berdasarkan Pendapatan Sebelum Reklamasi	49
Tabel 9. Pembangunan Reklamasi Berdasarkan Indikator Dampak Sosial	55
Tabel 10. Reklamasi Berdasarkan Indikator Dampak Sosial	57
Tabel 11. Pembangunan Reklamasi Berdasarkan Indikator Dampak Ekonomi	57
Tabel 12. Pembangunan Reklamasi Berdasarkan Indikator Dampak Ekologi	59
Tabel 13. Hasil Jawaban responden Terhadap Pembangunan Reklamasi berdasarkan indikator Dampak Ekologi	58
Tabel 14. Sikap Responden Terhadap Reklamasi Berdasarkan Dampak Indikator Dampak Ekologi.	60
Tabel 15. Koefisien Determinan (R ²)	61
Tabel 16 Uji F (simultan)	62
Tabel 17. uji t (Parsial)	63
Tabel 18. Koreksi Ekonomi Masyarakat dan Sosial Dengan adanya Reklamasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Situasi sebelum reklamasi.	7
Gambar 2: Peta situasi setelah reklamasi	7
Gambar 3: Peta Kota Parepare	17
Gambar 4: Peta titik-titik Sertifikat warga Pada Lokasi Reklamasi Pantai Cempae.....	24
Gambar 5: Overlay Perubahan Garis Pantai di Kecamatan Soreang ...	29
Gambar 6: Tata Ruang Kota Parepare	30
Gambar 7 Hasil reklamasi dan pembangunan ekonomi	33
Gambar 8 Kondisi Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan	35
Gambar 9 Kondisi Kawasan perdagangan dan komersil	36
Gambar 10 Kondisi ruang reklamasi Kota Parepare	37
Gambar 11 Kawasan fasilitas ekonomi Kota Parepare	37
Gambar 12: Kawasan pengembangan ekonomi setelah reklamasi	40
Gambar 13: Papan Bicara	53
Gambar 14. Jawaban Responden Terhadap Pembangunan Reklamasi	56
Gambar 15. Pembangunan Reklamasi Berdasarkan Indikator Dampak Ekonomi	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kusioner	81
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian.....	87
Lampiran 3 Analisis Regression.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di benua Asia, lebih tepatnya Indonesia terletak di wilayah Asia Tenggara dan merupakan negara yang berbentuk kepulauan (UNCLOS, 1982). Wilayah Indonesia bisa dikatakan sangat luas bila dibandingkan dengan negara-negara yang berada di Asia Tenggara lainnya, dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat terlihat dari luas wilayah Indonesia menurut Badan Pusat Statistik, yaitu 1.916.906,77 km² (BPS, 2021), yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 terluas didunia.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki negara lautan dan perairan yang luas. Luas Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dari Samudera Indonesia hingga Samudera Pasifik. Ini menjadikan Indonesia memiliki lautan yang luas sekitar 3.273.810 km² (KOMPAS, 2020). Dengan begitu, secara jelas Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim, yaitu negara yang mempunyai banyak perairan (Wahyono, 2007).

Kota-kota di dunia cenderung berkembang di sepanjang pesisir baik di laut maupun di sungai. Kota-kota tersebut kemudian berubah menjadi pusat pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat distribusi komoditas bagi kawasan di sekitarnya (Rully Damayanti, 2005). Demikian juga halnya kota-kota di Indonesia, sebagian kota-kota besar berada di wilayah pesisir. Sehingga masyarakat perkotaan di Indonesia sangat terkait dengan kawasan pesisir, sektor kelautan, serta segala potensi dan permasalahan yang ada di dalamnya. Berkembangnya kota-kota di kawasan pesisir berdampak terhadap keadaan di wilayah tersebut. Beberapa dampak yang ditimbulkan

antara lain, peningkatan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan sosial, perkembangan industri dan pariwisata, dan lain-lain sampai kepada dampak lingkungan yang ditimbulkannya baik positif maupun negatif (Setyawan, 2011). Selain itu, perkembangan kawasan pesisir juga memberikan dampak perubahan terhadap ruang dan pemanfaatannya di wilayah pesisir (Ningsi, 2017);

Reklamasi Pantai menurut Suhud (1998), dilakukan dengan tujuan 1) memperoleh lahan baru yang dapat mengurangi tekanan atas kebutuhan lahan di bagian kota yang sudah padat; 2) menghidupkan kembali transportasi air sehingga beban transportasi darat berkurang; 3) membuka peluang pembangunan nilai tinggi; 4) meningkatkan pariwisata bahari; 5) meningkatkan pendapatan daerah; 6) meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Pantai maupun ekonomi perkotaan; dan 7) meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut. Asumsi yang digunakan disini adalah semakin banyak kawasan komersial yang dibangun maka dengan sendirinya juga akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah Pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain-lain. Namun harus diingat pula bahwa bagaimanapun juga reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah Pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis sehingga akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi Pantai, dan berpotensi gangguan lingkungan.

Reklamasi pantai dan laut merupakan kebijakan negara-negara pantai yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi kebutuhan akan

lahan. Fenomena ini menguat terutama di negara-negara pantai yang ketersediaan tanah menjadi kebutuhan utama dalam program pembangunan kawasan. Kebijakan reklamasi di Indonesia sudah dilakukan di beberapa daerah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan tanah. Sampai saat ini kebijakan reklamasi terus berkembang bersamaan dengan perkembangan kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang semakin membutuhkan tanah (Susanti, 2018).

Di dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), kebutuhan manusia akan lahan semakin meningkat, sementara luas daratan semakin berkurang (Bappenas, 2017). Maka kebijakan reklamasi pantai dan laut dengan pemanfaatan wilayah pesisir menjadi alternatif dalam melengkapi ketersediaan lahan untuk berbagai kepentingan manusia, baik sebagai tempat mencari nafkah, tempat pemukiman, pusat bisnis dan perekonomian, kawasan industri, bandara, pelabuhan, tempat rekreasi maupun lahan untuk mengatasi erosi dan sedimentasi kawasan pantai (Attahmid, 2018). Dengan demikian, kebijakan reklamasi saat ini bukan sekedar alternatif, tapi menjadi pilihan yang tidak bisa ditolak. Untuk alasan itu, maka di beberapa kota pantai di dunia termasuk Indonesia melakukan kebijakan reklamasi pantai yang merupakan kebijakan pemerintah yang dimulai dengan menata ruang pesisir dan melakukan kegiatan pembangunan untuk diperoleh tanah baru hasil reklamasi (Santoso, 2015). Secara teknis, reklamasi dapat merubah konfigurasi pantai dan menutup sebagian wilayah laut sehingga sulit dibuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan laut termasuk mempengaruhi keragaman hayati secara negatif, mengganggu karakter fisik, aktivitas dan interaksi dari organisme-organisme dalam suatu lingkungan fisik wilayah laut terkait, namun, kebijakan reklamasi pantai terus dilakukan di wilayah pesisir pantai dan laut (F.Kalolo, 2008).

Dengan adanya reklamasi pantai diharapkan tidak hanya dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan, tetapi juga dapat memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada proyek reklamasi. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya dari kebijakan reklamasi ini adalah pengembangan serta peningkatan taraf perubahan sosial masyarakat pesisir, yang diketahui melalui perbandingan pendapatan perkapita dan pengeluaran perkapita rumah tangga sebelum dan sesudah adanya reklamasi (Mustaqim, 2014).

Pembangunan merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk peningkatan taraf hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Dalam konteks kebijakan, keputusan pengembangan tata ruang untuk wilayah pesisir memerlukan pertimbangan yang komprehensif mengenai dampak dari keputusan tersebut. Karena wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktivitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktifitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain dalam hal pembangunan (Alatas, 1977).

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini diramaikan dengan adanya berbagai kegiatan dalam memanfaatkan lahan ekosistem pesisir di antaranya dengan melakukan tindakan reklamasi ekosistem pesisir. Kegiatan reklamasi diperuntukkan untuk berbagai tujuan dan keperluan, seperti untuk area pelabuhan, tambak, kawasan bisnis dan hiburan serta lainnya. Kegiatan reklamasi terjadi hampir di seluruh wilayah pesisir Indonesia, terutama kota-kota yang memerlukan area lahan pembangunan yang mendesak. Kota-kota besar di Indonesia merupakan kota-kota pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki kegiatan perekonomian yang pesat, tetapi seringkali lahan yang tersedia tidak mendukung

pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota tersebut. Wilayah pesisir yang mana berada di bawah kewenangan pengelolaan daerah seringkali mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan ruang baru melalui reklamasi pantai sebagai tempat untuk berbagai aktifitas (Kamal, 2017). Salah satu daerah yang melakukan kebijakan tersebut adalah Kota Parepare, daerah kecil yang terdapat di bagian selatan provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan pemerintah Kota Parepare merujuk pada pasal 34 Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaksana reklamasi pantai, yaitu reklamasi pantai merupakan pranata hukum yang sah, walaupun harus dengan memperhatikan sejumlah syarat; dan kepastian hukum terhadap masyarakat, yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berupa jaminan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut didukung oleh ketentuan yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menentukan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara. Dalam pasal ini diberikan kepastian hukum terhadap keabsahan tanah hasil reklamasi, walaupun sampai pada ketentuan bahwa tanah itu dikuasai langsung oleh negara.

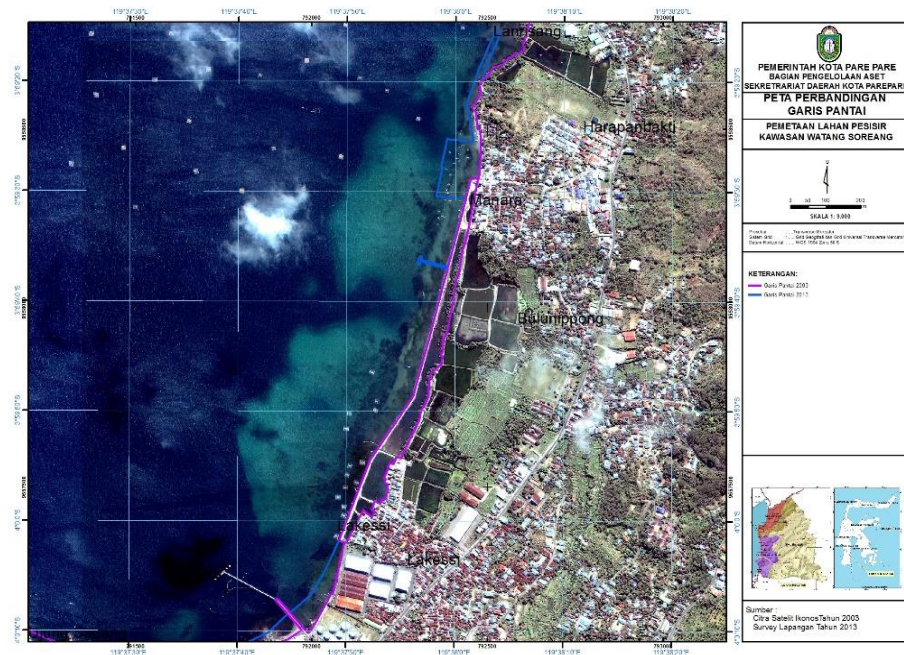
Dua hal yang perlu dipertimbangkan agar reklamasi pantai tidak menimbulkan konflik adalah: (1) Sosialisasi rencana dan dampak reklamasi ke masyarakat terutama yang akan terkena dampak; dan (2) Partisipasi masyarakat untukantisipasi dan adaptasi perubahan yang akan terjadi (Antik Bintari, 2018). Lahan hasil reklamasi berpotensi menimbulkan konflik. Konflik sangat potensial terjadi antara berbagai pihak, baik secara vertikal antar pelaksana pembangunan/pemerintah dengan pedagang/pengusaha, warga, dan

ormas maupun horizontal antar warga, pedagang/pengusaha, dan ormas (Suryadi, 2020)

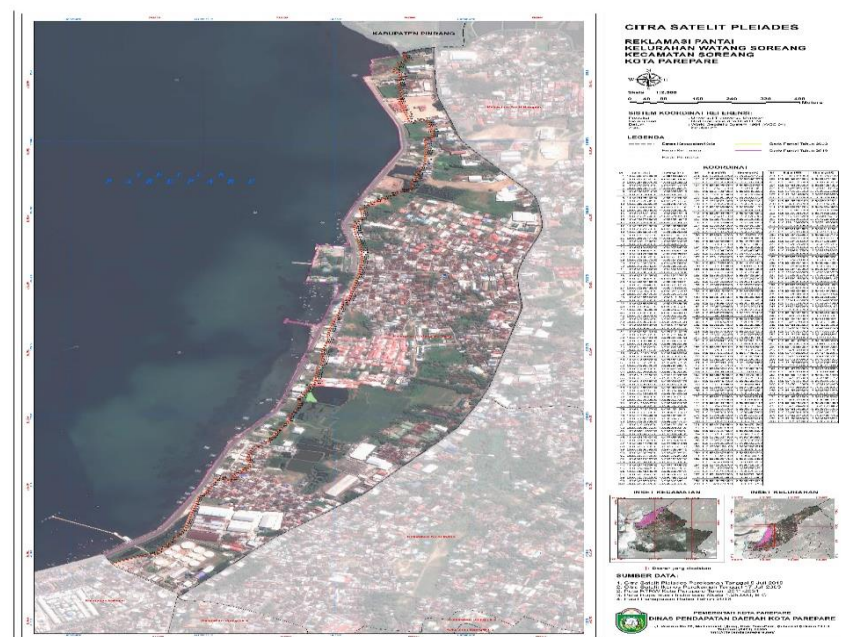
Dalam prakteknya, kebijakan reklamasi pantai oleh pemerintah Kota Parepare selain memberikan bentuk baru pada penataan lingkungan dan menunjukkan peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir juga menimbulkan permasalahan terkait dengan status kepemilikan tanah pada area sepanjang reklamasi.

Pada awalnya pantai Cempae merupakan lokasi lepas pantai yang sebagian wilayahnya berupa rawa dan empang serta area pemukiman penduduk. Sebagian besar mata pencarian masyarakat sekitar pantai adalah nelayan dan pekerja empang, yang banyak bergantung pada ekosistem laut.

Ketika pemerintah Kota Parepare melakukan reklamasi pantai Cempae yang terbentang dari pelabuhan Cappa Ujung sampai ke muara sungai Lauleng, perekonomian masyarakat setempat juga mengalami perubahan. Masyarakat sekitar merasa terdesak dan terganggu. Oleh karena itu terjadi pergeseran area gerak aktifitas warga masyarakat yang segera menempati sebagian lahan reklamasi dan mengklaimnya sebagai perluasan lahan usaha. Di lain pihak, Pemerintah Kota Parepare tidak segera mengamankan area tanah hasil reklamasi pantai, justru membiarkan masyarakat menempati dan beraktivitas pada lahan tersebut. Akibatnya sebagian masyarakat telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) diatas lahan reklamasi.



Gambar 1: Peta Situasi sebelum reklamasi.



Gambar 2. Peta situasi setelah reklamasi

Sumber: Bidang Asset Daerah, 2019

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Parepare melalui bidang Aset Badan Keuangan Daerah melakukan pemutahiran aset barang milik daerah. Dalam rapat unsur muspida bersama tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah) wilayah IV Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 11 September 2019 bertempat di ruang rapat BAPPEDA, direkomendasikan agar bidang Aset segera melakukan pengamanan lahan reklamasi pantai Cempae yang diserobot oleh masyarakat. Kepemilikan lahan oleh warga dan keinginan pemerintah kota parepare untuk mengamankan aset lahan pantai Cempae memunculkan konflik kepentingan.

Dari kondisi permasalahan tersebut di atas, menjadi obyek yang menarik dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Kebijakan Pemerintah terkait Rereklamasi Pantai Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Konflik Lahan Sertifikat Hak Milik ”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan bahasan latar belakang tentang prinsip-prinsip regulatif maupun prinsip-prinsip teoretis maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah tidak terpenuhinya seluruh aturan yang berlaku dalam reklamasi pantai Cempae, seperti hak menguasai sepenuhnya oleh negara, dan tidak jelasnya hubungan hukum antara para pemangku kepentingan dengan lahan hasil reklamasi, selain kurang efektifnya sosialisasi proyek reklamasi sehingga terjadi konflik kepentingan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek lahan hasil reklamasi pantai Cempae di Kota Parepare?
2. Bagaimana dampak reklamasi pantai Cempae Parepare terhadap kelangsungan perekonomian masyarakat pesisir?
3. Bagaimana arahan manajemen/pengelolaan terhadap lahan hasil reklamasi Pantai Cempae di Kota Parepare ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan ketiga pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk:

1. Mengidentifikasi status legalitas lahan hasil reklamasi pantai Cempae di Kota Parepare, agar menjadi dasar pertimbangan kebijakan penguatan status legalitas lahan tersebut.
2. Mengidentifikasi dampak reklamasi pantai tersebut terhadap kondisi perekonomian masyarakat pesisir, agar menjadi dasar kebijakan peningkatan perekonomiannya.
3. Mengidentifikasi arahan manajemen/pengelolaan lahan hasil reklamasi Pantai Cempae di Kota Parepare.

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi pemer kaya ilmu manajemen perkotaan, khususnya tentang legalitas proses reklamasi dan konflik kepemilikan lahan hasil reklamasinya.
2. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait reklamasi pantai dalam pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

1.4 Lingkup Penelitian

Penelitian ini menyangkut bidang ilmu manajemen perkotaan terkait kebijakan pemerintah daerah dalam reklamasi lahan pantai Cempae dan interelasinya dengan perekonomian masyarakat pesisir. Secara spasial wilayah penelitiannya adalah lahan reklamasi pantai Cempae yang terbentang dari pelabuhan Cappa Ujung sampai ke muara sungai Lauleng (lihat Gambar 1 di depan).

BAB II. METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah reklamasi pantai cempae kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2023. Proses pengambilan data primer dilakukan di lokasi reklamasi pantai cempae dan data sekunder diperoleh dari Bappeda dan bidang aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare.

2.2 Bahan dan Alat

Sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian serta penulisan pada tesis ini, alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Alat
 - a. Peneliti menggunakan statistik sebagai alat untuk mengolah kuisisioner.
 - b. Interpretatif untuk mengelola data wawancara/ interviu.
 - c. Pemetaan wilayah: Pemetaan wilayah dapat menjadi alat penting dalam mengidentifikasi dan memvisualisasikan dampak kebijakan reklamasi Pantai Cempae pada lingkungan dan masyarakat.
- 2) Bahan.
 - a. Kuisisioner

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Menurut (Sugiyono., 2011), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembagian kuesioner

secara langsung. Peneliti tidak lagi melakukan uji validitas dan reliabilitas mengingat kuesioner yang peneliti gunakan sudah diuji.

b. Wawancara/interviu

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Prof. DR. Lexy J. Moleong, 2018)

Wawancara mendalam adalah suatu teknik pengumpulan data yang digali dari sumber data yang langsung melalui percakapan atau tanya jawab terbuka untuk memperoleh data/informasi secara holistic dan jelas dari informan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. (Ahmad, 2005). Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan tujuan untuk mengetahui lebih detail kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat sekitar reklamasi Pantai Cempae. Proses wawancara secara umum terbagi menjadi dua yaitu:

1. Wawancara terhadap Pejabat Pemerintah Kota Parepare yang terdiri dari BAPPEDA, Bidang asset badan keuangan dan bidang hukum setdako daerah kota Parepare.
2. Wawancara terhadap masyarakat sekitar yang diwakili oleh beberapa masyarakat yang memanfaatkan lahan di lokasi reklamasi pantai cempae Kota Parepare.

2.3 Pelaksanaan Penelitian

Jadwal penelitian akan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, berlangsung dari bulan Maret hingga Mei tahun 2023

2.4 Parameter Pengamatan

Berikut beberapa contoh parameter pengamatan yang dapat digunakan dalam penelitian dengan objek penelitian tentang kebijakan pemerintah mereklamasi pantai Cempae dengan menggunakan metode campuran (*mix method*):

1. Variabel independen: Kebijakan pemerintah mereklamasi pantai Cempae.
2. Variabel dependen: Dampak kebijakan mereklamasi pantai Cempae terhadap masyarakat setempat, lingkungan, dan ekonomi.
3. Sampel: Masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan para pengusaha yang terkait dengan proyek mereklamasi pantai Cempae.
4. Metode pengambilan sampel: Pengambilan sampel acak sederhana untuk masyarakat setempat, purposive sampling untuk pemerintah daerah dan pengusaha terkait.
5. Alat ukur: Kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumen terkait dengan proyek mereklamasi pantai Cempae.
6. Reliabilitas: Kuesioner dan wawancara harus diuji kembali reliabilitasnya dengan metode uji reliabilitas internal.
7. Analisis data: Metode campuran, yaitu analisis kuantitatif dengan uji statistik seperti regresi linear dan analisis deskriptif, serta analisis kualitatif dengan teknik content analysis.
8. Hasil pengamatan: Kesimpulan dari hasil analisis data menunjukkan bahwa kebijakan mereklamasi pantai Cempae memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat setempat, lingkungan, dan ekonomi, namun dengan pengelolaan yang baik,

proyek mereklamasi pantai Cempae dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan setempat.

2.5 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tujuan penelitian yaitu masing-masing sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian tentang untuk mengidentifikasi status legal hasil reklamasi pantai cempae parepare dilakukan dengan teknik Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.

Menurut Creswell, strategi-strategi dalam mixed methods, yaitu:

1. Strategi metode campuran sekuensial/bertahap (*sequential mixed methods*) merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif, lalu diikuti dengan data kuantitatif dalam hal ini menggunakan survei. Strategi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. **Strategi eksplanatoris sekuensial.** Dalam strategi ini tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif.
 - b. **Strategi eksploratoris sekuensial.** Strategi ini kebalikan dari strategi eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama.
 - c. **Strategi transformatif sekuensial.** Pada strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini, peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya atau dibagikan secara merata pada masing-masing tahap penelitian.
2. Tujuan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan alat analisis regresi linier sederhana untuk mengolah datanya dengan menggunakan aplikasi (software) yaitu Statistic Product and Service Solution (SPSS) versi 26., yaitu:

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen (Y) apabila nilai variabel independen (X) mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah positif atau negatif.

Adapun bentuk persamaan dari regresi linier sederhana ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

keterangan:

Y = Return On Asset (nilai yang diprediksikan)

a = Konstanta (apabila nilai X = 0)

b = Koefisien regresi sederhana

X = Perputaran Modal Kerja (nilai variabel independen)

2.6 Teknik Pengambilan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kuisisioner

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Menurut (Sugiyono., 2011), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembagian kuesioner secara langsung. Peneliti tidak lagi melakukan uji validitas dan reliabilitas mengingat kuesioner yang peneliti gunakan sudah diuji.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan tujuan untuk mengetahui lebih detail kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat sekitar reklamasi pantai cempae, Proses wawancara secara umum terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Wawancara terhadap Pejabat Pemerintah Kota Parepare yang terdiri dari BAPPEDA, Bidang asset badan keuangan dan bidang hukum setdako daerah kota Parepare.
- b. Wawancara terhadap masyarakat sekitar yang diwakili oleh beberapa masyarakat yang memanfaatkan lahan di lokasi reklamasi pantai cempae Kota Parepare.